

LAPORAN KONSULTASI PUBLIK PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN  
RUTIN RUAS JALAN PENUNJANG KSPN KOMOD  
PROGRAM HIBAH JALAN DARAH  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Dasar Hukum FLLAJ Nusa Tenggara Timur. ....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Lokasi dan Tempat .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Pembahasan.....</b>	<b>4</b>
<b>2.3. Diskusi.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>9</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>9</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>iii</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

### 1. DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Jalan sebagai penghubung antar lokasi sentra-sentra ekonomi, pariwisata, industri dan sebagainya merupakan salah satu bagian terpenting dari prasarana yang harus diperhatikan, oleh karena itu perlu dilakukan percepatan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Pembangunan jalan diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan yang meliputi pembanguana terminal fasilitas keselamatan seperti Rambu, Marka, Pagar, LPJU, Traffic light, dan lain sebagainya akan tetapi banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan percepatan pembangunan tersebut.

Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut fisik dari jalan itu saja. Masalah lalu lintas dan angkutan jalan merupakan masalah lain yang perlu penanganan tersendiri dan harus segera dilakukan. Mengingat permasalahan yang sedemikian kompleks dan penanganannya melibatkan beberapa instansi maka harus ada upaya yang signifikan untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di setiap Provinsi dan kabupaten/kota.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Fungsi menyinergikan dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan, Menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peran dalam pembangunan insfrastruktur jalan melalui Program Hibah Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM).

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN Rupiah murni. PHJD sebagai suatu upaya percepatan pencapaian target kondisi jalan mantap yaitu 75% untuk jalan provinsi dan 65% untuk jalan kabupaten. PHJD ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada Pemda untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan sektor jalan kepada masyarakat.

PRIM merupakan kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia melalui program Indonesia Infrastructure Initiative – Indi yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan; termasuk dorongan kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharaan jalan.

Pelaksanaan PHJD menggunakan mekanisme sesuai dengan dasar hukum terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah ini kepada pemerintah daerah. Prasyarat mendapatkan dana hibah ini, Pemda harus melakukan pembiayaan terlebih dulu (pre-financing) dengan mengalokasikannya di dalam APBD tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi atas output yang telah ditetapkan dan kemudian penggantian/pencairan hibah akan dilakukan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kem. Keuangan) kepada Pemda melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berdasarkan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) atas hasil verifikasi. Program ini dikelola oleh Tim PHJD dan Pemda yang mendapatkan dana hibah membentuk tim Project Implementation Unit (PIU) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan program di masing-masing wilayahnya.

Salah satu program dari PHJD adalah melakukan pemberdayaan terhadap Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 59 tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018. Jumlah anggota FLLAJ yang terdapat pada surat keputusan tersebut adalah sebanyak 41 anggota yang terdiri

dari beberapa pejabat eselon II, III dan IV Pemprov NTT, Ditlantas Polda NTT, unsur masyarakat (LSM), akademisi, Jasa Raharja, Organda dan sebagainya.

## **1.2 Dasar Hukum PHJD Nusa Tenggara Timur.**

Adapun dasar hukum yang mengatur dalam Program Hibah Jalan Daerah ini yaitu :

1. Undang Undang tentang APBN;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah; Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

## **1.3 Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Berdasarkan dasar hukum yang ada, adapun Peran dan Tugas FLLAJ Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Mewujudkan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, tertib, teratur, dan selamat.
3. Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Memfasilitasi, membantu memberikan solusi dan mendorong penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan melalui musyawarah untuk mufakat.
5. Mengadakan rapat bulanan, 3 bulanan dan tahunan sesuai kebutuhan forum untuk memantapkan koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul di setiap penyelenggara serta mencari jalan keluar secara proposional dan bertanggungjawab.
6. Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara LLAJ serta ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang).
7. Menerima masukan dari masyarakat terkait jalan, lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Menyediakan informasi kepada publik terkait jalan, lalu lintas dan angkutan jalan.
9. Melakukan konsultasi publik melalui media masa untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat.
10. Melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

## **BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK**

### **2.1. Lokasi dan Tempat**

Kegiatan konsultasi publik ini dilaksanakan di Kantor Direksi PHJD, Desa Mbuit Kecamatan Komodo, Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat, 10 Juli 2020, pukul 15.00 Wita, yang di hadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Pejabat Pembuat Komiten Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTT, Bpk. Johannes Yonerson, ST, PIC Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kontraktor PT. Adisti Indah, Dinas PUPR Provinsi NTT, Kepala Desa Mbuit, Aparat Desa Mbuit, Anggota FLLAJ Manggarai Barat, FLLAJ Provinsi NTT, dan Masyarakat Desa Mbuit.

### **2.2. Pembahasan**

Pembahasan konsultasi publik oleh Bpk. Patris D. Lutungan, ST, selaku PPK PHJD, Topik yang dibahas adalah:

#### **a. Latar Belakang**

Pembangunan disektor jalan merupakan bagian penting dalam pembangunan Nasional dan merupakan prasarana transportasi utama di Negara kita. Banyak tantangan dan kendala yang dihadapi Pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan di sektor jalan antara lain topografi daerah yang berbeda-beda sehingga membutuhkan jenis penanganan yang berbeda pula.

#### **b. Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)**

- Mengacuh pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJM) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah 2019.
- Pemerintah Daerah disyaratikan untuk melakukan pembiayaan terlebihdahulu dengan mengalokasikannya di dalm APBD tahun anggaran berjalan.
- Penggantian/pencairan hibah akan dilakukan dari Ditjen Perimbangan keuangan (DJPK) kepada Pemda melalui KPPN berdasarkan rekomendasi teknis dari ditjen Bina Marga atas hasil verifikasi.



- Insentif tambahan untuk perbaikan tata kelola dan kinerja (output non fisik/institusi) dinas-dinas terkait di Pemerintah Daerah dan FLLAJ.

#### **c. Sistem Kerja Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)**

- Peningkatan sistem dan prosedur perencanaan, pemrograman dan pembiayaan melalui *Provincial/ Kabupaten Road Management system (PMKRS)*.
- Peningkatan kualitas proses pengadaan kemampuan Pemerintah Provinsi/kabupaten dalam implementasi penerapan sistem e- katalog untuk pekerjaan rutin.
- Peningkatan keterlibatan masyarakat dan transparansi untuk kualitas pekerjaan pemeliharaan jalan, peningkatan peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pemeliharaan jalan, penanganan keluhan masyarakat/masukan masyarakat dan penerapan kesetaraan gender serta keterlibatan kaum marginal misalnya kelompok disabilitas.

#### **d. Pelaksanaan Kegiatan PHJD**

- Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kualitas pekerjaan;
- Peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ);
- Peran serta aksi nyata masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan terutama keterlibatan Gender dan Kaum Disabilitas;
- Peran serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

### **2.3. Diskusi**

#### **1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT selaku Ketua Forum LLAJ Provinsi NTT.**

Waktu pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan ini berlangsung sampai dengan 10 November 2020. Apabila dari pihak pelaksana pekerjaan mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kerja maka pihak desa Mbuit dapat mengajukan permohonan memberikan tenaga kerja kepada Perusahaan yang bersangkutan sehingga dana penggunaan dalam proses peningkatan jalan dapat tersalur juga ke masyarakat desa Mbuit. Dengan demikian akan memperoleh hasil yang baik dalam kerjasama antara perusahaan yang menangani pekerjaan peningkatan jalan dengan

pihak masyarakat setempat. Masyarakat tidaklah perlu untuk berterimakasih kepada pemerintah karena sudah merupakan kewajiban bagi Pemerintah untuk melaksanakan Visi Misi dari Pemerintah Provinsi NTT.

2. Petrus Luntungan selalu PPK Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTT.

Jumlah anggaran peningkatan jalan ini senilai Rp. 75 M yang akan digunakan untuk membangun jalan yang panjangnya 33 KM. dengan adanya peningkatan jalan ini dapat merubah ekonomi khususnya dalam Desa Mbuit. Proses Pekerjaan dilakukan secara transparan. Terkait rambu – rambu dalam kontak pelaksanaan pekerjaan ada penjelasan mengenai peningkatan kinerja, sehingga setelah kami selesaikan pekerjaan akan dilaporkan ke Dinas Perhubungan Provinsi NTT untuk melaksanakan pemasangan fasilitas keselamatan jalan. Dalam proses peningkatan pekerjaan jalan ini bisa melibatkan kaum perempuan dan kaum disabilitas dalam hal ini pekerjaan yang sesuai dengan kaum perempuan dan kaum disabilitas.

3. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTT.

Selain anggota PUPR Provinsi NTT juga ada FLLAJ Dinas perhubungan Provinsi NTT yang berfungsi sebagai wahana untuk menyalurkan apa yang menjadi keluhan, masukan di sekitar lokasi pekerjaan peningkatan jalan, Baik itu menyangkut material yang digunakan dalam proses pekerjaan, hasil yang diperoleh, fasilitas keselamatan pada pengguna jalan yang belum terpasang, serta angkutan jalan yang belum ada dalam Kecamatan ini. Apabila jalan yang sedang dibangun telah selesai maka masyarakat bisa melakukan aktifitas lebih baik dari sebelumnya. Untuk proses peningkatan jalan ini apabila masyarakat memperoleh masalah dapat langsung dilaporkan ke pihak terkait, dalam hal ini kepada pelaksana pekerjaan, Konsultan yang mengawasi proses pekerjaan dan kepada pihak Dinas PUPR Provinsi NTT juga bisa di Forum LLAJ Provinsi NTT dalam bentuk pesan sms, whatsapp, Website resmi masing-masing instansi terkait. Apabila semua pekerjaan ini satu paket dengan rambu- rambu maka harus diperhatikan spesifikasi dari rambu-rambu dan marka yang akan digunakan.

4. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTT.

Selama ini belum ada Angkutan Dari Damri karena jalan yang belum bisa di lewati karena jalan yang rusak. Masyarakat bias menyampaikan surat permintaan kendaraan transportasi umum/

Damri ke Dinas Perhubungan Kabupaten dan tembusannya ke Dinas Perhubungan Provinsi NTT.

5. Yohanes Yonerson, ST, PIC Provinsi NTT.

Untuk peningkatan pekerjaan jalan ini perlu dilakukan juga pemeliharaan paket pekerjaan yaitu dibagian bahu jalan dan drainase. Rumput-rumput yang tinggi di bahu jalan dipangkas agar membantu penglihatan pengguna jalan lebih luas dan untuk menghindari kecelakaan bagi pengguna jalan, sampah sampah yang berada dalam saluran drainase dibersihkan sehingga air dapat mengalir terus sampai ke tempat yang direncanakan dan juga air tidak meluap sampai ke badan jalan yang mengakibatkan kerisakan aspal badan jalan. Dalam pekerjaan yang ringan ini bisa dilibatkan juga kaum perempuan dan disabilitas. Tindakan pemeliharaan ini lakukan untuk apabila tim PHJD tidak ada lagi maka masyarakat sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan pemeliharaan.

6. Kepala Desa Mbuit.

Ucapan terima kasih yang begitu besar kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT bersama Kepala bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta Kepala Bidang Angkutan Jalan yang telah datang ke Desa Mbuit dan kepada anggota-anggota lain yang telah hadir di tempat ini untuk mengundang kami dalam kegiatan sosialisasi ini. Kami berharap banyak dari Bapak/I sekalian untuk membantu membangun Kabupaten Manggarai Barat khususnya Desa Mbuit. Kami berterimakasih juga kepada pihak Dinas PUPR Provinsi NTT untuk membangun jalan desa Mbuit ini. Adanya pekerjaan peningkatan jalan Desa Mbuit telah mengalami kemerdekaan karena jarak tempuh dari Desa Mbuit ke Labuan Bajo sebelumnya 4 jam dan sekarang membutuhkan waktu 1 jam saja. Awalnya pekerjaan pembangunan jalan berjalan dengan lancar, akibat adanya Covid 19 para pekerja dari luar daerah tidak bisa didatangkan untuk melaksanakan peningkatan jalan maka pelaksana peningkatan jalan bekerjasama dengan masyarakat Desa Mbuit untuk memperkerjakan/mengambil tenaga kerja untuk bersama-sama membangun jalan.

7. Pak alexander

Pohon pohon yang tumbang di titik tertentu pada ruas jalan Provinsi ini harus di potong agar tidak mengakibatkan kecelakaan.

8. Pak Stef selaku Pelaksana Paket Pekerjaan Peningkatan jalan PHJD.

mengharapkan kepada para pekerja yang telah yang dikontak untuk melaksanakan peningkatan suatu bagian pekerjaan agar konsisten dalam waktu kerja untuk mengejar persentasi dari fisik pekerjaan. Diharapkan untuk warga masyarakat Mbuit dapat menerima perkerja lain dari luar daerah yang bersama-sama melaksanakan peningkatan pekerjaan.

9. Alosius selaku tokoh masyarakat.

Terimakasih telah membangun jalan di Desa Mbuit ini sehingga kami merasakan kesejahteraan. Terimakasih kepada Pak. Marten karena telah ramah dengan masyarakat untuk membantu ikut ambil bagian dalam proses pembangunan jalan. Slauran saluran telah dibuat deker sehingga tidak lagi banjir diperumahan warga sekitar.

10. Ibu sinta selaku tokoh masyarakat.

Melibatkan kaum perempuan untuk ikut bekerja dalam pembangunan pekerjaan.

11. Yos selaku Tokoh masyarakat.

Pada saat hujan terjadi banjir disekitar pemukiman, dimohon agar dibuat drainase sehingga pada saat hujan tidak lagi terjadi banjir.

12. Pak Ignas

Ruas jalan yang terdapat sungai dimohon agar segera dibangun jembatan agar pada saat musim hujan pada pengguna jalan dapat melewati ruas jalan tersebut. Hal ini membuat resah masyarakat setempat pada saat malam hati apabila terjadi hujan.

## **BAB III. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN Rupiah murni. PHJD sebagai suatu upaya percepatan pencapaian target kondisi jalan. PHJD ini dimaksud juga sebagai insentif kepada Pembda untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan sektor jalan kepada masyarakat. Peningkatan pemeliharaan jalan, penganan keluhan masyarakat tersebut akan menjadi bagian kerja dari Forum LLAJ.

### **2. Saran**

Kami harapkan pemerintah daerah peserta program PHJD dapat memanfaatkan dan mengelola dana hibah secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat output. Penghargaan setinggi-tingginya kami berikan kepada Pemerintah Australia atas proyek rintisan PRIM melalui Hibah PRIM dan KIAT sebagai unit pendukungnya.

# LAMPIRAN

## DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK



Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT selaku Ketua Forum LLAJ Provinsi NTT yang sedang memberikan kata sambutan sebelum di mulainya Konsultasi Publik di Desa Mbuit.



Kegiatan Konsultasi Publik ini di hadiri oleh Kepala Desa Mbuit, Aparat Desa Mbuit dan Masyarakat Desa Mbuit.



